

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi hubungan internasional tidak dapat lepas dari adanya konsep *power*. Menurut Nye (2008) *power* didefinisikan sebagai kemampuan yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pihak lain guna memperoleh *outcome* yang dikehendaki. Dalam studi hubungan internasional, konsep *power* ini juga terbagi menjadi dua, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk mencapai kepentingannya dengan melalui tindakan dalam bentuk paksaan ataupun ancaman (Raimzhanova, 2015). *Hard power* ini sendiri erat kaitannya dengan militerisasi. Secara tradisional, negara-negara dulu lebih memilih menggunakan *hard power* dalam meraih kepentingannya. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman dan isu-isu dalam hubungan internasional, metode ini tidak lagi dinilai cukup efektif dalam penyelesaian masalah, mengingat saat ini tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan penggunaan militer (Bound, et al. 2007). Oleh karena itu, *soft power* hadir sebagai konsep yang bertolak belakang dengan *hard power*.

Berkebalikan dengan *hard power*, *soft power* merupakan kemampuan yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain tanpa adanya paksaan dan

pembayaran, tetapi justru menggunakan daya tarik (Nye, 2008). Oleh karenanya, *soft power* tidak berlaku bagi pihak-pihak yang hendak memperoleh kekuatan dengan cara paksaan. Nye (2008) juga menjelaskan bahwa dari segi perilaku, *soft power* merupakan suatu kekuatan yang digunakan untuk menarik. Dari segi sumber daya, sumber daya *soft power* itulah yang merupakan asset yang dapat menghasilkan daya tarik tersebut. Adapun sumber daya *soft power* suatu negara bertumpu pada budaya, *value* (nilai), serta kebijakan luar negerinya (Nye, 2008).

Soft power mengutamakan terciptanya rasa perdamaian dan juga kerja sama. *Soft power* juga sangat menghindari terjadinya konflik dalam hubungan antar negara. Selain itu, berkembangnya globalisasi secara pesat, membuat sebagian besar negara yang ada di dunia saat ini lebih gencar melakukan diplomasi dengan menggunakan *soft power* ketimbang penggunaan *hard power* (Prabaningtyas, 2015).

Soft power dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif apabila pihak lain atau pihak yang dituju mengetahui dan mengenali upaya tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah mekanisme yang diperlukan untuk dapat melingkupinya (Yani & Lusiana, 2018). Salah satu mekanisme tersebut yang dapat dilakukan dalam penyebaran *soft power* adalah melalui diplomasi publik (*public diplomacy*).

Diplomasi publik didefinisikan sebagai suatu metode yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga masyarakat baik secara

langsung maupun tidak dengan tujuan untuk mempengaruhi citranya di mata publik negara lain, yang mana hal ini juga dapat mempengaruhi *foreign policy* pemerintah negara lain (Signitzer & Coombs, 1992). Diplomasi publik ini menjadi suatu instrument yang dipergunakan oleh pemerintah dalam memobilisasi sumber daya (*soft power*) guna berkomunikasi dan menarik perhatian publik luar negeri (Nye, 2008). Oleh karenanya, penting bagi suatu negara yang hendak melakukan diplomasi publik untuk memiliki sumber daya yang menarik.

Dalam pelaksanaannya, diplomasi publik ini diaplikasikan dengan mengedepankan meningkatkan citra atau *branding* suatu negara dengan mengaitkan kebudayaan negara tersebut. Adapun pelaksanaan diplomasi publik memiliki tujuan guna memupuk pandangan positif masyarakat lain terhadap negara pelaku diplomasi publik dengan melakukan interaksi. Interaksi yang dilakukan pun tidak terbatas pada *government to people* saja, tetapi juga dapat melalui *people to people* (Ratnanggana, et al. 2022). Dalam menjalankan misi diplomasi suatu negara, kini publik telah menjadi instrument yang penting, terlebih dengan semakin beragamnya bidang serta situasi yang terintegrasi (Dwirezanti, 2012).

Seperti halnya dengan negara lain, di Indonesia sendiri pun praktik diplomasi publik ini juga sudah telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya sangat memberikan keuntungan bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan (Hutasoi &

Dermawan, 2019). Indonesia terus berupaya untuk mempromosikan pariwisatanya dengan dibentuknya kebijakan pembangunan pariwisata dalam 3 aspek yang diunggulkan. Pertama yaitu produk alam yang terdiri dari ekowisata, wisata petualangan serta wisata bahari. Kedua yaitu produk budaya, meliputi wisata warisan budaya serta sejarah, wisata kota/desa, dan juga wisata belanja dan kuliner. Ketiga yaitu produk buatan manusia (Ratman, 2016).

Dalam upaya pembangunan pariwisata Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya tarik wisata, pemerintah umumnya berupaya dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang dapat membuat masyarakat internasional tertarik (Hutasoi & Dermawan, 2019). Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan selain sebagai salah satu upaya untuk membangun daya tarik wisata, juga merupakan sebagai bentuk diplomasi publik Indonesia guna membangun citranya di mata masyarakat global. Selain itu, pelaksanaannya pun tidak terbatas hanya pada *event* yang digelar oleh pemerintah negara saja sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, tetapi juga oleh pemerintah daerah sebagai aktor sub-nasional (*sub-state*).

Saat ini, fungsi aktor sub-nasional dalam diplomasi publik meninggalkan dampak yang positif untuk mengembangkan kekuasaannya dan dapat menjadi perwakilan negaranya di mata dunia (Wang, 2005). Aktor sub-nasional dalam diplomasi publik memiliki tiga peranan. Pertama memperluas aktor dalam hubungan internasional. Kedua, mengkoordinasi serta menyatukan inisiasi *foreign policy*. Dan yang terakhir yaitu adanya keterlibatan masyarakat

sipil serta kontribusinya terhadap aktor sub-nasional tersebut serta hubungan internasional (Hutasoi & Dermawan, 2019). Krusialnya peran aktor sub-nasional ini membuat pemerintah Indonesia mendorong pemda-pemda yang ada di Indonesia untuk melakukan diplomasi publik. Salah satu pemerintah daerah yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan praktik diplomasi publik yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan merupakan daerah di Indonesia yang memiliki sektor andalan di bidang pariwisata. Kabupaten Bintan berupaya untuk mempromosikan pariwisatanya serta menarik wisatawan asing dengan membangun citranya melalui diplomasi publik. Adapaun upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu melalui *sport tourism* dengan mengadakan *event* olahraga berskala internasional yang bertajuk “Tour de Bintan”.

Tour de Bintan merupakan *event* olahraga balap sepeda internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan tiap tahunnya yang mana pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 lalu. Tour de Bintan sendiri merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat dengan berkolaborasi dengan *Bintan Resort Cakrawala (BRC)* dalam rangka mempromosikan pariwisata Kabupaten Bintan serta meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara, mengingat event ini merupakan ajang berskala internasional.

Tour de Bintan pada tahun 2016 lalu telah resmi masuk ke dalam kalender pertandingan *Grand Fondo World Series 2017* oleh *Union Cycliste Internationale* (UCI) atau Asosiasi Balap Sepeda International dan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga, Tour de Bintan 2017 menjadi tahun perdana pelaksanaan *event* yang telah masuk ke dalam kalender UCI. Hingga sampai sekarang pun, Tour de Bintan selalu rutin menjadi salah satu event balap sepeda yang termasuk dalam series tersebut dalam setiap tahun penyelenggaraannya.

Gambar 1.1 Pelaksanaan Tour de Bintan Tahun 2017



Sumber : www.tourdebintancycling.com

Sebagai *event* olahraga berskala internasional, tiap tahunnya *event* ini didominasi oleh para peserta dari puluhan negara yang turut berpartisipasi. Bahkan, acara ini didominasi oleh peserta dari negara lain, daripada peserta dari

Indonesia sendiri. Berikut disajikan data jumlah peserta Tour de Bintang selama beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1 Jumlah peserta Tour de Bintang dari tahun 2016-2022

No.	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	2016	824 peserta
2	2017	1.053 peserta
3	2018	1.200 peserta
4	2019	1.200 peserta
5	2020	-
6	2021	-
7	2022	946 peserta

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti (2023)

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah pesepeda yang berpartisipasi dalam *event* Tour de Bintang semakin bertambah tiap tahunnya. Adapun pada tahun 2018 dan 2019 memiliki jumlah peserta yang sama dikarenakan keterbatasan hunian, sehingga jumlah peserta yang mengikuti perlombaan hanya maksimal sampai 1.200 peserta. Munculnya pandemic covid-19 turut mempengaruhi pelaksanaan *event* Tour de Bintang ini, yang mana menyebabkan ditiadakannya *event* ini pada tahun 2020 hingga 2021. Setelah dua tahun tertunda, akhirnya *event* ini kembali dilaksanakan pada tahun 2022

lalu pada bulan Oktober dengan jumlah peserta sebanyak 946 peserta. Jumlah ini tentunya mengalami penurunan dibandingkan tahun terakhir pelaksanaan. Kendati demikian, angka ini terbilang cukup tinggi, menimbang kondisi yang saat itu masih dalam masa pemulihan pasca covid-19.

Tingkat antusiasme pesepeda baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang terbilang cukup tinggi ini, dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menjalankan praktik diplomasi publiknya. Hal ini bertujuan untuk membangun citra Kabupaten Bintan yang baik dimata internasional khususnya dalam bidang pariwisata, yang mana hal ini merupakan aspek yang berusaha untuk ditonjolkan dalam penyelenggaraan event ini. Dengan dibangunnya kesan yang baik ini tentunya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi Kabupaten Bintan yang mana salah satunya yaitu dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung, mengingat Kabupaten Bintan sendiri memiliki sektor unggulan di bidang pariwisata. Selain itu, tingkat antusiasme yang tinggi ini juga dapat mempengaruhi keberlanjutan dalam pelaksanaan *event* ini kedepannya.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas tersebut tentunya akan mendatangkan efek positif lainnya seperti berkembangnya pariwisata, peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan citra ini dapat mempengaruhi pemenuhan kepentingan baik daerah maupun negara. Hal ini pun juga sejalan dengan visi Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu

“Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat” (Kemenlu, 2015).

Olahraga dapat digunakan sebagai alat diplomasi yang dinilai cukup efektif, menjadi instrument yang dapat menumbuhkan perdamaian, solidaritas serta peningkatan perekonomian. Selain itu, olahraga juga dapat menjembatani terjadinya pertukaran budaya antar negara (Castro, 2010). Kurtulus (2014) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan di sektor olahraga kebanyakan merupakan bagian dari diplomasi publik. Dalam hal ini, olahraga berperan sebagai instrument dalam pelaksanaan diplomasi publik guna memupuk citra baiknya di mata masyarakat global. Bahkan di beberapa negara olahraga digunakan sebagai sebuah alat propaganda, politik ataupun penguasaan ekonomi (Fadel, 2019).

Acara Tour de Bintang merupakan *event* yang bergerak di bidang pariwisata dan olahraga. Dalam penelitian ini, penulis juga melihat *event* ini sebagai media yang menjembatani pelaksanaan diplomasi publik Pemerintah Kabupaten Bintang. Pemerintah Kabupaten Bintang dalam hal ini memiliki peran yang berkaitan dalam pelaksanaan diplomasi publik, mengingat Kabupaten sebagai tuan rumah serta pelaksana *event* Tour de Bintang ini. Dalam tulisan ini juga menjadikan Pemerintah Kabupaten Bintang sebagai aktor sub-nasional. Dengan demikian, diplomasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang memiliki tujuan untuk meningkatkan citra serta daya tarik

daerah terutama di bidang wisata, sehingga dapat menarik masyarakat asing untuk berkunjung.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan selaku penyelenggara dan aktor pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi publik pada *event* Tour de Bintan. Peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan karena sektor pariwisata serta olahraga memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan event tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan persepsi masyarakat global terhadap tuan rumah. Oleh karenanya, peneliti mencoba mengangkat topik ini dengan harapan dapat menjadi masukan bagi pemda setempat serta para aktor yang terlibat lainnya agar dapat lebih gencar lagi dalam melaksanakan diplomasi publik. Dengan demikian, berangkat dari latar belakang tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah “Diplomasi Publik Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Pelaksanaan *Event* Tour de Bintan Tahun 2017-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana diplomasi publik Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan daya tarik Bintan sebagai destinasi wisata dan *sport tourism* pada pelaksanaan *event* Tour de Bintan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui adakah peningkatan citra positif Bintan di bidang pariwisata dan *sport tourism* terutama dimata masyarakat internasional yang berpartisipasi atau turut hadir dalam ajang Tour de Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi para pembaca maupun peneliti sendiri mengenai bagaimana upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam upaya meningkatkan citra serta daya tariknya di mata masyarakat global dalam pelaksanaan *event* Tour de Bintan. Selain itu juga dapat mengetahui dampak positif apa saja yang mengikuti dari terlaksananya *event* ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta wawasan penulis mengenai apa itu diplomasi publik serta pentingnya potensi pariwisata dalam pembangunan daerah serta negara

2. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara *event* Tour de Bintan dalam meningkatkan intensitas pelaksanaan praktik diplomasi publiknya dengan masyarakat global agar dapat memiliki citra dan *branding* yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi daerah dan negara

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat mengenai diplomasi publik serta diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terkait potensi di bidang pariwisata

4. Bagi Peneliti Lainnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, informasi ataupun referensi tambahan bagi para pembaca untuk menjadi bahan pada penelitian selanjutnya